

Nasionalisme dan Pelestarian Warisan Budaya #1

Moh. Ali Fadillah

Pendahuluan

Secara geografis kepulauan Indonesia menempati posisi strategis dalam peta sejarah dunia, antara peradaban mediteranea dan India di barat dan Cina di timur. Setelah melewati fase migrasi prehistorik yang bergelombang dari bagian utara Asia Timur, sejak masa-masa awal abad Masehi sampai menjelang milenium ketiga, kepulauan telah menjadi sebuah wadah leburnya berbagai kebudayaan. Tetapi Belanda, ahli-ahli pertama yang mengkaji sejarah Indonesia dengan sedikit sistematis, awalnya hanya melihat Indonesia dari dua jaman utama: « indianisasi » dan VOC.

Pasca kemerdekaan ada rehabilitasi visi: dari kolonialis ke nasionalis dengan munculnya semangat Indonesia-sentrisme. Skema sejarah Indonesia menjadi 3 momentum penting: sebelum, pada saat dan sesudah kehadiran Belanda; semacam pembajuan dari badan periode pertama, tetapi mempunyai misi politis: mengangkat kebesaran Majapahit, penyesalan atas hari-hari kelabu di bawah tekanan kolonial dan sejarah kontemporer; sebuah visi menghadapi alam merdeka (Lombard, 1995: 17-18).

Visi nasionalis semakin solid pada skema generasi kedua. Setelah sebelumnya berhasil menerangi kekaburan masa prasejarah, yang lebih signifikan adalah

penemuan kembali periode Islam yang sangat kurang dipelajari. Sayap penelitian arkeologi sejak ini lebih berkembang, mengungkap bentang waktu sejak periode Prasejarah sampai kolonial. Sejarah kebudayaan Indonesia, meski ditandai Prof. Taufik Abdullah (1999: 55) masih terpenggal-penggal atas berbagai aktivitas kebudayaan, telah menemukan kerangkanya yang mencakup ruang dan waktu yang kompleks.

Di sini mau tidak mau kita harus berhadapan dengan sebuah permukaan dengan bekas-bekas yang muncul dari bawah. Jika saya seorang geolog akan saya katakan bahwa bekas-bekas itu berasal dari strata dengan periode berbeda. Semua bekas itu tampak secara induktif pada permukaan yang sama: era modern yang banyak diwarnai jejak Eropa yang semakin mengglobal. Kendati ada gejala *cultural shock* dalam batas-batas tertentu, dampak pengaruh modernisasi tidak meniadakan bekas-bekas prasejarah, India, Cina dan Islam. Semuanya masih muncul di permukaan dan ikut mewarnai setiap mentalitas dan kebudayaan masa kini. Dapatkah kita sebut ini sebuah mozaik budaya, lalu, identitas apa yang bisa kita berikan pada kebudayaan ini? Tiba-tiba saja saya merasa takut untuk bertanya, apakah identitas kebudayaan

itu mengatasi ras, etnik atau ini yang bisa dikatakan identitas *nation* kita: pluri-etnik dan pluri-religius?

Tidak ada salahnya jika saya berangkat dari kenyataan bahwa secara administratif, pembagian wilayah Indonesia lebih bernuansa etnik, mengikuti pelabelan kolonial yang telah lebih dulu memberi papan-papan nama pada kelompok-kelompok «identitas» Nusantara yang belum jelas betul kategorinya (Perret, 1995: 10-14). Meskipun substansinya tidak sama, tetapi Republik tetap menjaga bingkai wilayah «kesukuan». Tanpa sadar, sebenarnya ini adalah politik nasionalisme Indonesia yang melihat pentingnya dasar-dasar genealogis, linguistik, dan jejak-jejak kultural lain yang spesifik. Lalu sekarang bagaimana perubahan-perubahan periode sejarah yang panjang menyentuh identitas primordial itu? Ada gejala mutasi transformatif selama periode prasejarah dan sejarah. Dari dimensi ruang dan waktu, identitas selalu dibangun dan dibangun kembali, melalui elemen-elemen budaya baru, untuk memungkinkan individu atau kelompok membawa identitas masuk ke dalam komunikasi dan interaksi lebih proporsional dengan situasi sosial yang ada: politik, ekonomi, kultural. Beberapa kasus di Sumatra Utara, Kalimantan dan Sulawesi, dari pendekatan sejarah identitas, terekam bahwa identitas budaya pada gilirannya semakin diperkuat perannya oleh apa yang disebut Dr. Daniel Perret «*sentiment d'appartenance*». Namun ada bahayanya, bahwa dengan identitas itu, ketika menjadi primordial, dan direkayasa dengan alasan-alasan rasional untuk aksesnya ke sumber-sumber ekonomi (material), sosial, politik, maka kepen-

tingan etnik menjadi dominan daripada nasional.

Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana jadinya nasionalisme kita: akankah (dan sekarang ada gejala mengarah) menjadi rivalitas etnik dan menimbulkan nasionalisme tradisional. Gejala lain, bisa jadi muncul nasionalisme jenis baru, supra-nasional: persekutuan atas dasar jejak-jejak budaya homogen seperti Uni Eropa, atau atas dasar agama [dunia Arab, India, Pakistan], dan di Asia Tenggara, telah lama kita diperkenalkan pada apa yang disebut dunia Melayu. Untuk kedua kalinya saya merasa takut bertanya, apakah identitas-identitas kultural itu mengacaukan nasionalisme kita? Jika identitas etnik, dan bahkan ras diterangkan sebagai konseptualisasi kelompok yang dengan identitasnya memungkinkan secara lebih luas untuk mengoposisikan diri dengan kelompok lain berdasarkan diferensiasi genealogis dan budaya, lalu bagaimana interaksi-interaksi antar kelompok-kelompok itu dalam aksesnya membentuk nasionalisme kita?

Gagasan mengajukan topik ini memang bukan lagi orisinal, tetapi jika mengingat fenomena aktual yang sedang kita alami menjelang abad XXI ini, dinamikanya mempunyai kutub yang sama, yakni idealisasi nilai-nilai budaya bagi kepentingan jati diri sebuah bangsa. Sebuah gejala, sekaligus isu utama, dunia semakin menjadi satu. Runtuhnya tembok Berlin seakan menjadi simbol penyatuan dunia mengakhiri perang dingin. Globalisasi identik dengan uniformisasi dan ini berarti membawa risiko pada gaya hidup dan mentalitas. Klimaksnya, «kebudayaan» seperti diingatkan Raillon (1995: 55), mungkin akan

terlindas oleh sejenis « mesin giling global ».

Ini mungkin sebuah ketakutan! Atau barangkali lebih tepat suatu kekhawatiran, membuat sebagian kecil komponen bangsa waspada. Mereka telah merapatkan diri untuk menghadapi globalisasi. Berbagai konsep diterapkan para pengambil keputusan dengan mempopulerkan konsep-konsep seleksi, adopsi, adaptasi dan inovasi serta resistensi atas berbagai elemen asing untuk diserap dan dipadukan dengan tata nilai budaya sendiri, kalau mungkin, menjadi tata nilai baru tanpa kehilangan karakter Indonesia. Aplikasinya terus dilakukan melalui misi alih-teknologi, memperkenalkan Indonesia dari berbagai dimensi [potensi sumber alam, tenaga, dan kebudayaan] dan perubahan politik yang semakin terbuka dan menjanjikan. Dalam rangka itu pula dikembangkan strategi ekspansi ekonomi: mencari peluang pasar dan membuat kontak dan pertukaran.

Dari langkah ini, Indonesia secara teoritis telah memasukkan dirinya ke dalam komunitas bangsa-bangsa dunia; tetapi di sini ia harus ikut menentukan. Ini boleh kita anggap sebagai cara memperkuat sentimen nasional di era globalisasi: sebagai sebuah masyarakat, Indonesia terus mencari cara untuk masuk ke dalam kompetisi dan memenangkan permainan dalam persaingan ketat, sudah tentu atas nama program pembangunan nasional (Propenas).

Pada kesempatan *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII* di Yogyakarta, Nurhadi (1999) mencoba menempatkan posisi, peran dan kinerja arkeologi dalam konteks pembangunan nasional. Untuk itu ia menawarkan perlunya mengamati

perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, memprediksikan perubahan yang akan atau bahkan pasti terjadi. Globalisasi buat seorang arkeolog atau sejarawan memang bukan baru, tetapi menjelang Milenium III mempunyai karakter: perubahan tata nilai yang cepat dan simultan berkat teknologi komunikasi yang dikenal sebagai abad satelit. Ini artinya arkeologi menghadapi tantangan. Ia menggagas perlunya arkeologi menyiapkan diri. Potensi arkeologi harus dilihat dari *outcome*-nya. Watak arkeologi, menurut Nurhadi, melayani jasa informasi akademik atau keilmuan, tetapi sasarannya, kecuali kalangan akademisi, juga birokrat-teknokrat dan masyarakat luas. Tampak di sini, gagasannya lebih bernuansa aplikatif: menguatkan jati diri bangsa, menjaga bingkai kesatuan bangsa dan dinamika perubahan desa dan urbanisasi. Hukum arkeologi, seperti juga disiplin lain, adalah obyektivitas, melihat secara empirik persamaan dan perbedaan dalam material arkeologi. Jadi kembali kepada format negara bangsa, *Bhinneka Tunggal Ika*, Nurhadi masih tetap menonjolkan persatuan, tetapi tak membahas soal perbedaan, apa salahnya jika kita mencoba gagasan perlunya memahami perbedaan justeru untuk menyelamatkan persatuan.

Nasionalisme Indonesia:

Refleksi Sejarah

Meskipun globalisasi telah berlangsung sejak lama menurut jiwa jamannya, tetapi kali ini, kontak yang terus-menerus dengan Eropa, sejak kolonisasi, dan meningkat melalui intensifikasi ekonomi [juga bantuan pembangunan: fisik dan sains-teknologi], Indonesia harus

menerima biang modernisasi pertamanya dari Eropa sebagai konsekuensi masuknya Indonesia ke dalam sistem ekonomi dunia. Ini menjadi sebab utama perubahan-perubahan kontemporer: ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perubahan itu telah mulai terjadi dan terus akan terjadi, membawa konsekuensi pada model-model budaya yang berposisi dengan gaya hidup « tradisional »; menghidupkan ambiguitas kita; di satu pihak harus mengakui perlunya modernisasi sebagai tipe penyesuaian atas « jiwa jaman », namun tetap memelihara kekhawatiran akan konsekuensi-konsekuensi logisnya (Pelras, 1995: 36). Tetapi bagaimana Indonesia menghadapi ini. Jika boleh, mengapa kita tidak mencoba memakai tolok ukur nasionalisme Indonesia. Dalam kerangka hipotesis, tampaknya nasionalisme kita didasari oleh elemen-elemen kesatuan Indonesia yang membentuk perekat, yang dalam bahasa Raillon (1995: 52) disebut semen nasionalisme Indonesia. Paling tidak, ada tiga elemen fundamental bagi kontinuitas Indonesia, yang menyatukan etnik dan varian-variananya: negara yang kuat, kebangkitan masyarakat madani dan persistensi nasionalisme itu sendiri.

Kekuatan pertama terletak pada peran menentukan negara. Di sini ada kontinuitas, meski ada perbedaan ideologi politik dan psikologi yang ditampakkan oleh dua tipe kepemimpinan nasional kita sebelum « reformasi », tetapi keduanya tetap konsisten pada kesatuan Indonesia. Ini berarti ada dasar pemikiran ke arah *nation-building* sebagai konstruksi nasional. Namun, negara yang kuat tidak cukup menciptakan sebuah negeri. Ia perlu sebuah kekuatan

besar untuk melanggengkan institusi. Dan sekarang, saya harus menyambut gembira kebangkitan masyarakat madani yang mulai menemukan otonominya setelah selama hampir lebih dari dua dasa warsa masih tergantung pada regim berkuasa. Kelompok masyarakat yang kerap dijuluki « kelas menengah » itu telah memfasilitasi percampuran antar-etnik, terutama dalam kota-kota yang berkembang dengan serba cepat, hasil ekspansi ekonomi yang telah memaksa industrialisasi dan mengharuskan urbanisasi. Kota-kota semakin merak-sasa, menjadi wadah berpadunya kebudayaan nasional, karena di sana, orang-orang bertemu dan bertukar. Kebudayaan-kebudayaan juga bertemu di situ, dan bahasa nasional mempersatukan orang-orang kota yang juga berasal dari keseluruhan negeri.

Elemen ketiga yang menjadi « semen perekat » adalah terutama persistensi nasionalisme itu sendiri. Sebuah bangsa baru lahir justeru karena kemededekannya dimulai oleh motor nasionalis di atas fondasi *le désir d'être ensemble*. Malahan tampak bukan sekadar kontinuitas nasionalisme Indonesia yang menyentuh sebagian besar etnik pembentuk *nation*, tetapi juga eksisnya kemungkinan nasionalisme baru yang membentuk semen lebih solid setelah melalui berbagai ujian separatis. Dan elemen yang terpenting, adalah ideologi Pancasila. Kita tahu sifatnya universal, menampung semua perbedaan dalam format ideologi negara yang mengangkat isu-isu nasionalisme dan humanisme.

Dilihat dari potensi ini, elemen-elemen dasar nasionalisme kita cukup solid menghadapi konsekuensi globalisasi. Namun gejala-gejala disintegrasi

memaksa kita merenungkan kembali perbedaan-perbedaan. Kekayaan dan keanekaan, fondasi sejarah, dan bumi yang kaya dengan monumen arkeologi-sejarah, bahasa nasional dengan asal-usul lokal berbeda, kekuatan etnik yang resistan, serta « atmosfir » Islam tetapi bukan negara Islam, telah lama dikagumi dunia, karena Republik mampu menjaga warisan budaya ini. Maka dunia juga sekaligus menaruh kekhawatiran disintegrasi ini. Sejalan dengan Raillon (1995), pertanyaan saya juga tertuju pada apakah entitas Indonesia itu dalam kualitas ini dan bagaimana keseluruhan kompleks itu berfungsi: sejarah, budaya, etnik, religi dan ruang geografis. Hanya keberanian saja yang mengharuskan saya mempertanyakan ketika menghadapi masalah yang tetap sensitif.

Kalau diidentifikasi, maka masalah itu berakar pada: ekonomi kapitalis kelompok tertentu, pemusatan geografis, dominasi etnik tertentu, isu asing dan pribumi, agama mayoritas dan minoritas, otonomi daerah dan sentralisasi, serta munculnya kecenderungan baru: perbedaan ideologi politik berbagai kelompok kepentingan mengawali kebangkitan kelas menengah pembentuk masyarakat madani. Apakah semen nasionalisme kita sekarang mampu mengatasi semua realitas itu? Jika kembali kepada semboyan « sakral » kita *Bhinneka Tunggal Ika*, agaknya kita terlalu takut untuk melihat perbedaan dengan secara permanen mengangkat isu persatuan, tanpa diimbangi dengan pemahaman mendalam tentang perbedaan. Bukankah kini tidak lagi « tabu » untuk merenungkan kembali perbedaan-perbedaan dasar [geografi dan budaya] dan varian-varian historik dan

kontemporer [ideologi politik, kelas-kelas sosial ekonomi] justru untuk mengembangkan « ketunggal-ikaan » Indonesia.

Arkeologi dan Kebangkitan Nasionalisme Indonesia

Mari kita lihat bagaimana kajian arkeologi memberi kita jejak-jejak variasi kultural. Berangkat dari sebuah manifestasi daya tarik beberapa amatir Belanda pada periode klasik, perhatian kekunaan lebih mengarah pada *Art History*. Pengaruh kerangka pikir Renaisans yang membekalinya model Romanisasi Eropa telah memusatkan perhatian pada inventarisasi monumen-monumen karya seni Hindu-Budha di Jawa. Daya tarik monumen kita telah memberi para amatir gagasan untuk menghimpun diri, melanjutkan pola kerja amatir itu dengan kegiatan: reproduksi grafis, foto monumen dan relief-relief keagamaan; memperkaya gedung-gedung penyimpanan benda seni yang kemudian menjadi koleksi utama Museum Nasional di Jakarta. Kendati begitu, pekerjaan amatir telah mengembrio kelahiran disiplin arkeologi di tanah jajahan. Berkat pendirian instansi penelitian sekaligus penyelamatan dan pelestarian secara bertahap, sejarah kuna Hindia timur menemukan sedikit cahaya dengan dikukuhkannya periode-periode berkelanjutan (Guillot, 1995).

Dari kaca mata sekarang, pekerjaan besar sejarah dan arkeologi Belanda harus diakui sebagai reperkusi yang tak menunggu lahirnya masyarakat Indonesia baru. Mereka telah mengangkat kembali bukti kebesaran yang terlupakan dari masa lalu « Hindia »-nya yang

prestisius. Tidak ada keraguan, pekerjaan restorasi pada masa embrionik itu mempunyai peran primordial dalam misi ini. Ia memungkinkan banyak orang Indonesia membuka kembali pandangannya tentang karya kolosal dan sering menakjubkan yang pernah direalisasikan nenek-moyang orang Indonesia selama seribuan tahun. Realisasi Eropa, terlepas dari visi kolonialis pada awalnya, namun telah menjadi suplemen mengangkat pentingnya peradaban Indonesia yang muncul sebagai salah satu kebudayaan besar dunia; menghasilkan peradaban yang patut dibanggakan kesetaraannya dengan peradaban besar di dunia lain. Arkeologi, dengan demikian, telah memberikan kembali surat-surat berharga masa lalu yang kabur dalam mitos-mitos legendaris. Dalam bentuk puing-puing memang, tetapi bekas pusat-pusat politik-ekonomi dan keagamaan mulai menemukan signifikasinya; karya-karya manusia yang mengalami evolusi dan penghalusan bagi generasi berikutnya (*Ibid.*, Guillot, 1995).

Menjelang alam kebebasan setelah berakhirnya perang Pasifik, para nasionalis terkagum-kagum pada masa lalunya dan terutama untuk Majapahit yang teritorialnya mencakup nusantara yang luas, lebih besar dari wilayah yang diklaim Belanda. Kajian filologi dan epigrafis atas karya-karya kesusastaan semakin menarik perhatian para nasionalis. Berkat kitab *Desawarnana (Nagarakertagama)* misalnya, puing-puing dan legenda Majapahit keluar dari kegelapan. India memang, dalam pekerjaan para nasionalis pertama dianggap sebagai ibu kesusastaan, seni dan pengetahuan. Pendek kata, ia

menjadi ibu bagi klasisme Indonesia, namun visi ini justru mempunyai signifikansi politik: peradaban timur telah menunjukkan kegemilangan dan kekunaan yang kokoh daripada peradaban barat yang membenarkan pengelola-pengelola kolonial melalui superioritas mereka.

Masa lalu dengan begitu telah membentuk pandangan para nasionalis bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar sebelum datangnya Eropa dan meyakinkan mereka sesudah keberangkatannya. Setelah merdeka, mereka memiliki kesempatan untuk memperluas kajian sejarah dan kebudayaan bangsa dan menemukan kembali kebesaran masa lalunya. Ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk memerintah negerinya sendiri yang dipropagandakan rejim kolonial, benar-benar terbantah oleh arkeologi dan sejarah.

Dalam masa-masa pencarian identitas nasional, pemerintah Republik Indonesia yang yakin akan pentingnya arkeologi bagi sejarah dan jati diri bangsa, memutuskan memelihara jawatan purbakala dan memelihara ordonansi perlindungan tinggalan arkeologi. Di bawah Dr. R. Soekmono dan Dra. Satyawati Sulaeman, Dinas Purbakala, pengganti *Oudheidkundig Dienst* warisan Belanda, ahli-ahli pertama Indonesia tidak hanya siap mengambil tongkat estapet, tetapi semakin mengarah ke profesionalisme, ditunjang oleh pendidikan arkeologi yang dibuka di universitas-universitas penting, mencetak kader-kader arkeolog baru.

Masa orde baru tampak ada perbaikan besar berkat peningkatan ekonomi. Dan sekarang, krisis ekonomi yang

melanda Indonesia tidak menjadi halangan besar bagi kelanjutan penelitian. Di bidang lain, arkeologi telah menjadi juru bicara di tingkat internasional. Ini adalah politik baru arkeologi memperkenalkan jati diri bangsa melalui kajian kebudayaan materi dalam dinamikanya: kontinuitas dan perubahan. Visi Arkeologi adalah mengetengahkan kebudayaan Nusantara yang disokong kebudayaan daerah. Dimulai dari periode kepemimpinan Prof. Dr. R.P. Soejono dan dikembangkan Prof. Dr. Hasan M. Ambary, Puslit Arkenas (sekarang : Pusat Arkeologi) membuka Balai-Balai Arkeologi, memperluas jangkauan penelitian ke seluruh wilayah Indonesia, mengikuti usaha-usaha penyelamatan dan restorasi yang telah lebih dulu dilakukan Ditlinbinjarah (sekarang: Direktorat Purbakala) di bawah Drs. Uka Tjandra-sasmita dan penerusnya, dengan suaka-suakanya di seluruh Indonesia.

Pekerjaan arkeologi kolonial, memang mempunyai konotasi pengangkatan dominasi bangsa Arya: indikasi ketidak-berdayaan bangsa Indonesia, tetapi arkeologi nasionalistik menempatkan penemuan periode itu dalam posisi berbalik, kejayaan negara maritim Sriwijaya dan negara agraris Majapahit adalah refleksi kebesaran bangsa Indonesia sebelum dominasi Eropa, mengikat jaringan maritim Nusantara, yang kemudian dikembangkan oleh kota-kota niaga jaman Islam jauh lebih luas dari bekas teritorial *Nederlandsh-Indië*. Ini berarti bekal bagi bangsa untuk membentuk nasionalisme dan memerintah negeri sendiri, mereka mewarisi negara-negara tua, mengambil alih kontinuitas sejarah dalam bentuk nasionalisme Indonesia.

Politik Arkeologi bagi Konstruksi Kesadaran Nasional

Tidak bisa ditawar lagi bahwa nasionalisme Indonesia hidup dengan format kesatuan dan keragaman. Tetapi melihat gejala-gejala empirik dan memprediksikan implikasi globalisasi: internal dan eksternal, arkeologi menghadapi tantangan berat di masa depan. Visi arkeologi sudah tentu diarahkan pada pengembangan politik arkeologi yang dasarnya telah dibangun menjelang dan sesudah kemerdekaan. Dalam batas-batas tertentu kita dapat membandingkan visi nasionalisme ini ke dunia arkeologi Eropa dan bangsa-bangsa yang baru lahir dari penjajahan, karena di sana arkeologi tidak hanya berkembang mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi sekaligus memainkan peran besar dalam konstruksi nasionalisme « negara bangsa ».

Siân Jones (1997) mengatakan bahwa di Eropa tampak dengan jelas bahwa kelahiran nasionalisme Eropa berjalan sejajar dengan penelitian arkeologi. Arkeologi terbukti mempunyai peran dalam pembentukan dan pelegitimasi identitas budaya kolektif. Realitasnya tampak pada pengelolaan material arkeologi yang berguna bagi dua aspek: memberi atribut pada masyarakat masa lampau dan memberi bahan bagi masyarakat masa kini yang ingin mencari jejak genealogi kembali ke asal-usul bangsa. Subyektivitas itu kenyataannya tidak menghilangkan kandungan « bebas nilai » arkeologi, malahan berlaku sebaliknya, ia memainkan peran signifikan dalam pengembangan disiplin ini. Dengan begitu [situasi ini] memungkinkan munculnya arkeologi sebagai disiplin

dalam konteks nasionalisme Eropa, karena terbukti bahwa material arkeologi telah memberi bentuk dan substansi pada mitos asal-usul kolektif.

Banyak studi kasus telah menunjukkan penggunaan arkeologi untuk merekonstruksi dan melegitimasi identitas nasional dan klaim-klaim teritorial yang jauh lebih intensif dari sekadar asumsi. Di Denmark misalnya, kompleks kubur/dolmen telah membentuk konstruksi sebuah nasional, sebagai afirmasi arkeologi untuk membangun kembali kesadaran nasional dalam menghadapi represi *chauvinism* Jerman (Kristiansen, 1992: 19-21). Demikian pula pendekatan *nationalistic archaeology* untuk Keltik di daratan Inggris, mengatasi kesadaran etnik. Dan Perancis selalu mengangkat esensi kebudayaan materi Galik menghadapi dominasi Yunani-Romawi.

Peran penting arkeologi juga dirasakan oleh negara-negara bangsa yang muda: legitimasi negara modern Israel dianggap mempunyai hubungan genealogis langsung dengan Israel kuna. Berdasarkan tinggalan jaman besi yang sangat berbeda dengan periode belakangan, dan pengungkapan situs Masada; bunuh diri massal Yahudi menghadapi tekanan Romawi, telah menjadi simbol kesadaran nasional Israel, membentuk fokus ziarah dan upacara militer. Negara itu telah menggunakan arkeologi untuk membenarkan eksistensinya dan untuk mengintegrasikan imigran-imigran yang mempunyai sejarah dan pengalaman-pengalaman baru; mencoba mencegah konflik internal. Mata uang, perunggu, simbol-simbol dan bahasa digambarkan dari masa-masa kuna dan dari periode « Bible » untuk mengingat kembali

kontinuitas sejarah dan menciptakan « negara bangsa ».

Demikian pula di Afrika hitam, bangsa-bangsa yang baru saja terbebas dari kolonialisme telah kembali ke arkeologi untuk menolong mempersatukan sebuah *potpourri* etnik yang terpecah-pecah. Sebuah masa lalu yang « indah » nyatanya telah mampu membutakan rivalitas etnik kekinian. Dari contoh-contoh itu, dengan jelas bahwa arkeologi tampil sebagai « agen » bagi penciptaan kebanggaan nasional dan untuk kelangsungan tradisi-tradisi nasional (Richard I. Ford, 1973: 85).

Jika kita berangkat dari kasus-kasus tersebut, maka ada dua indikasi penting menandai kepentingan arkeologi bagi nasionalisme: arkeologi dan nasionalisme saling menjalin dalam konteks berbeda dan arkeologi mempunyai cakupan kontribusi lebih kompleks dari sekadar identitas kolektif.

Ini berarti bahwa nasionalisme mempunyai banyak bentuk dan selalu mengalami perubahan nyata akibat adanya representasi historik dan kultural dari tradisi-tradisi nasional yang khusus. Maka « negara bangsa » hanya salah satu dari banyak kemungkinan bagi identitas komunal dalam dunia kontemporer. Keberadaannya sering mengalami konflik lokal daripada global. Contoh adanya fenomena *ethnic revival*, lahirnya gerakan-gerakan dunia IV yang memecah Union Soviet dan Blok Timur, serta gerakan-gerakan separatis di dunia lain. Buat kita, mestinya ini menjadi cermin tentang pemahaman terhadap realitas plural: multi-kultural sebagian negara-negara baru, yang kadang tanpa atau dengan identitas berbeda dengan ideologi negara.

Sebaliknya, ada kesadaran membentuk identitas lebih besar, mengatasi perbedaan lokal, menemukan persamaan-persamaan regional, entitas supranasional yang membentuk klaim pada identitas budaya anggota-anggotanya seperti telah disebut contohnya di muka: Uni Eropa, gerakan fundamentalis agama « bangsa Islam » di dunia Arab, atau bangsa Hindu di India. Tetapi, benang merahnya tampak pada idealisme untuk membentuk negara bangsa yang homogen yang bagian-bagiannya mempunyai ciri khusus dan relatif menghadirkan « era lampau dalam bentuk modern ».

Persoalannya yang mendasar adalah interpretasi arkeologi sering mengandung konflik tentang masa lalu. Problem krusial yang dihadapi arkeolog sekarang adalah: kapan dan bagaimana para arkeolog dapat mengambil keputusan dari banyak interpretasi masa lalu? Dapatkah kita membedakan antara interpretasi yang seimbang, obyektif dan yang distorsi? Apakah perbedaan interpretasi itu hanya masalah subyektivitas yang lebih mengarah pada kelaikan: kebijakan politis? *Political will* kita sekarang adalah bagaimana kita dapat menggunakan pengetahuan arkeologi untuk pembangunan identitas-identitas homogen masa kini. Masalahnya, kecil sekali analisis tentang asal-usul etnisitas dan hubungan kebudayaan materinya dengan identitas etnik. Sebaliknya ilmu-ilmu humaniora lain telah mengulas debat teoritis tentang etnisitas, mereka telah membaca perubahan penting dalam pemahaman kita tentang diferensiasi sosio-kultural. Sayangnya, perkembangan itu belum banyak diantisipasi arkeologi.

Memang telah tampak beberapa arkeolog berusaha mempersamakan kebudayaan-kebudayaan arkeologi, ditentukan atas dasar asosiasi berulang-ulang dari kebudayaan materi yang mempunyai ciri khas dengan grup-grup masyarakat kuna, misalnya *Toalean culture* pada beberapa kompleks situs di Sulawesi atau *Dongson culture* untuk budaya undagi di Indocina. Mengapa kita belum mengembangkan secara memadai kerangka teoritis untuk menginterpretasikan isu etnisitas dalam arkeologi: sejak kedatangan penutur Austronesia, perkembangan lokalnya ke Austro-Mongoloid atau Austro-Melaneoid, lalu kapan dan bagaimana terbentuknya etnik-etnik dengan sub-subetniknya di kepulauan. Memang belum sampai ke arah itu, tetapi bukan berarti tidak ada landasan teoritis dan metodologisnya. Pendekatannya sudah tentu dapat ditekankan pada cara-cara yang konsep-konsep dan pengertiannya mengkerangkakan masa kini pada masa lalu dan di sini obyek-obyek studi arkeologis satu sama lain akan saling menentukan. Seperti dalam disiplin sejarah, pada dasarnya masa lalu dan masa kini adalah sebuah dialog. Dengan demikian, dialektika antara masa lalu dan masa kini perlu dieksplorasi melalui konsep-konsep dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis arkeologis dan dilanjutkan dengan pembahasan identitas masa kini (Jones, 1997).

Jadi isu utama diskusi kita adalah keinginan melekatkan suatu identitas pada obyek-obyek atau monumen tertentu, yang sering diekspresikan melalui tema-tema grup etnik atau masyarakat yang menghasilkan tinggalan tersebut dan yang difigurkan dalam jantung

penelitian arkeologi. Isu kedua berkenaan dengan kelompok-kelompok masyarakat masa lalu yang secara historis terungkap, semacam varian-varian ras dan etnik pembentuk *nation* Indonesia. Dan isu ketiga, substannya nasionalisme selama awal sampai pertengahan abad XX, memberi lahan subur bagi tumbuhnya perhatian pada tinggalkan arkeologi: dengan pengangkatannya dari dalam tanah sampai restorasi dan melestarikannya untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam pengertian luas, upaya itu dilakukan untuk mencari jejak nasional kita, mengembangkan nasionalisme yang telah dibangun dalam peran antagonisnya menghadapi kolonialisme Belanda, misalnya nasionalitas versi Majapahit sebagaimana dipopulerkan Mr. Muhammad Yamin; yang dalam konteks sekarang harus lebih diperkaya dengan visi nasionalitas yang bernuansa lintas budaya.

Seperti menyejarah, kita telah banyak mengembangkan pendekatan « sejarah budaya » untuk penelitian arkeologi. Meski akhir-akhir ini mulai diragukan keandalannya untuk kajian analitik, dalam banyak hal, terutama dalam konteks politik arkeologi, kita masih dapat mengembangkannya. Dengan kerangka kerja kronologis dan spasial, kita telah melihat pentingnya skema periodisasi sejarah kebudayaan Indonesia, apalagi penelitian kita di akhir abad XX ini masih berhadapan dengan banyak lapangan yang masih *terra incognita*. Kita memang belum menerapkan metode etnologi langsung, tetapi interpretasi arkeologi sering memasuki wilayah pencarian jejak grup-grup masyarakat tertentu kembali ke prasejarah dengan dasar-dasar asosiasi

dan horizon temuan. Ini, dengan jelas, berangkat dari pandangan bahwa keberadaan masyarakat itu dapat didokumentasikan oleh sinkronisasi sumber-sumber arkeologi dan sejarah (Sklenar, 1983: 91). Tanpa kita ketahui bahwa Rudolf Vorchow, pendiri *German society for Anthropology, Ethnology and Prehistory*, juga menerapkan kerangka kronologis dalam mendefinisikan grup etnik berdasarkan material arkeologi dengan cara mengkompilasi secara sistemik tipe-tipe obyek yang tipikal dan distribusi geografisnya (Kossack, 1992: 80-2).

Dari berbagai laporan penelitian dan artikel-artikel arkeolog kita, refleksi bahwa kebudayaan masyarakat dapat didefinisikan atas dasar jejak-jejak kebudayaan materinya yang terasosiasi dengan situs-situs pada wilayah tertentu dan pada masa lalu tertentu pula. Maka asumsi saya adalah bahwa kontinuitas kebudayaan juga menunjukkan kontinuitas etnik. Dengan dasar-dasar metodologi *settlement archaeology*-nya, Gustaf Kossinna pernah mengklaim bahwa kita mempunyai kemungkinan untuk mengidentifikasi grup-grup etnik besar ke dalam masa prasejarah yang basisnya terdapat pada propinsi-propinsi budaya, sedangkan kebudayaan-kebudayaan individual berkaitan dengan suku-suku (Triggers, 1989: 165). Dari situ, Childe (1933: 198) yakin bahwa « kebudayaan adalah sebuah warisan sosial, ia berkaitan dengan suatu komunitas yang mengatur tradisi-tradisi, institusi-institusi dan cara hidup yang umum ». Sebuah grup mungkin mempunyai alasan untuk disebut masyarakat kepada mana « kebudayaan » dari seorang arkeolog harus dikaitkan. Jika etnik menjadi sifat dari masyarakat itu, kita

dapat mengatakan bahwa arkeologi menaruh harapan besar untuk mengukuhkan sebuah sejarah etnik Nusantara, yang baru separuh abad lebih membentuk « nasionalisme » Indonesia yang riil; bukan mitos politik.

Saya yakin, meskipun citra Barat, terutama Amerika telah banyak terserap dalam kehidupan modern Indonesia, kita masih menjadi pewaris material arkeologi, tinggalan nenek moyang kita yang dominan. Perubahan-perubahan evolusioner makro-kultural hampir tidak pernah benar-benar terjadi baik dalam prasejarah maupun arkeologi sejarah Nusantara. Semangat kita berangkat dari kelanjutan kultural, bukan diskontinuitas budaya seperti tradisi arkeologi Amerika atau Australia yang melihat arkeologi Indian atau Aborigin sebagai prehistorik dan « mati ». Namun, bagaimana pun kewaspadaan kita perlu dipertaruhkan untuk menjaga kontinuitas historis dalam perubahan global.

Unsur-unsur perbedaan paling tidak bisa dimulai dengan variasi etnik, agama dan sosio-ekonomi. Kepentingan etnik memang kreativitas budaya yang resistan, tetapi sekaligus potensial menumbuhkan rivalitas berlebihan dan berdampak pada *ethnic revival* dalam konstruksi *nation* Indonesia. Kepentingan agama telah menggejala melalui benturan-benturan nilai dan norma teologis dan terakhir, kepentingan sosial-ekonomi yang telah menciptakan kesenjangan sosial, terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat. Seluruh potensial perbedaan itu barangkali akan berdampak pada pembesaran jarak kultural dengan yang sedang kita teliti dan restorasi dewasa ini.

Maka, solusi atau lebih tepat sebuah renungan, dalam memperkuat visi kita pada kekuatan jati diri bangsa dalam menghadapi globalisasi, kita masih mempunyai kesempatan mengukuhkan misi kita dalam format nasionalisme Indonesia: ideologi politik, agama, ekonomi, integritas etnik. Berangkat dari visi dan misi ini, marilah kita mulai dengan menempatkan arkeologi, juga sebagai kontinuitas sejarah yang landasannya telah dibangun generasi arkeologi sebelum kita. Gagasan Nurhadi (1999) yang berangkat dari, dalam konteks ini, arkeologi mempunyai peran sebagai media transfer jasa informasi budaya, adalah pilihan aplikatif untuk kita menempatkan informasi itu sesuai dengan tingkat pencerapan dan kepentingan penerima jasa: cendekiawan, birokrat-teknokrat dan awam. Ketiga komponen bangsa itu mempunyai peran berimbang dalam membangun wawasan dan apresiasinya pada sejarah kebudayaan, dasar dari keragaman *nation* Indonesia. Menciptakan hubungan masa kini dan masa lalu bagaimanapun merupakan sebuah dialog untuk menentukan dasar-dasar kebudayaan nasional kita menghadapi era yang akan datang.

Penutup

Bagi seorang arkeolog, situs atau tinggalan arkeologi, seperti dikatakan Barker (1977), adalah « [...] an historical document which, like a written record, must be deciphered, translated, and interpreted before it can be used ». Jika kita setuju dengan pandangan itu, maka pengelolaan warisan budaya tidak dengan sendirinya dapat menghubungkan masyarakat kini dan masa lalu, karena « dokumen » itu harus dibaca, diterje-

mahkan dan diinterpretasikan sebelum ia menjadi informasi berhadapan dengan lingkungannya yang baru: yang mungkin masih kuat dengan mitos legendaris atau malahan telah berubah total mengikuti jiwa jamannya; membawa kepentingan religius, etnik, sosial-ekonomi yang lebih dominan.

Tentu kita tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Kluckohn tentang esensi *archaeological research* yang dalam konteks ini mengatakan bahwa « *It provides a healthy intellectual interest manifested in the archaeological National Monuments* » seperti banyak diapresiasi di Amerika. Arkeologi Indonesia bukan sekadar memenuhi hasrat kognitif segelintir orang, tetapi bagaimana kita dapat mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian, penyelamatan, dan pemuanganinggalan arkeologi kepada pewarisnya, yang karena tekanan berbagai kepentingan kontemporer, mulai kehilangan identitas-identitas kulturalnya. Namun, ketika kebutuhan untuk *raison d'être* semakin mendesak, maka *outcome* arkeologi telah siap menjadi fondasinya.

Namun, sejauh ini kita tetap menyadari, bahwa kita hanya mampu mengangkat kembali image-image fragmentaris tentang masa lalu. Entitas-entitas yang terungkap itu mungkin hanya bagian dari klip-klip sebuah film tua yang bisu, yang tidak terproyeksi dengan baik (Barker, 1977: 12). Tugas kita adalah membangun kembali edisi lebih lengkap dan lebih akurat dari masa lalu itu. Memang ia tidak akan pernah lengkap, beberapa fakta sensitif mungkin mengharuskan kita menghadapi distorsi-distorsi sensor dan penyuntingan dari sudut pandang disiplin arkeologi itu

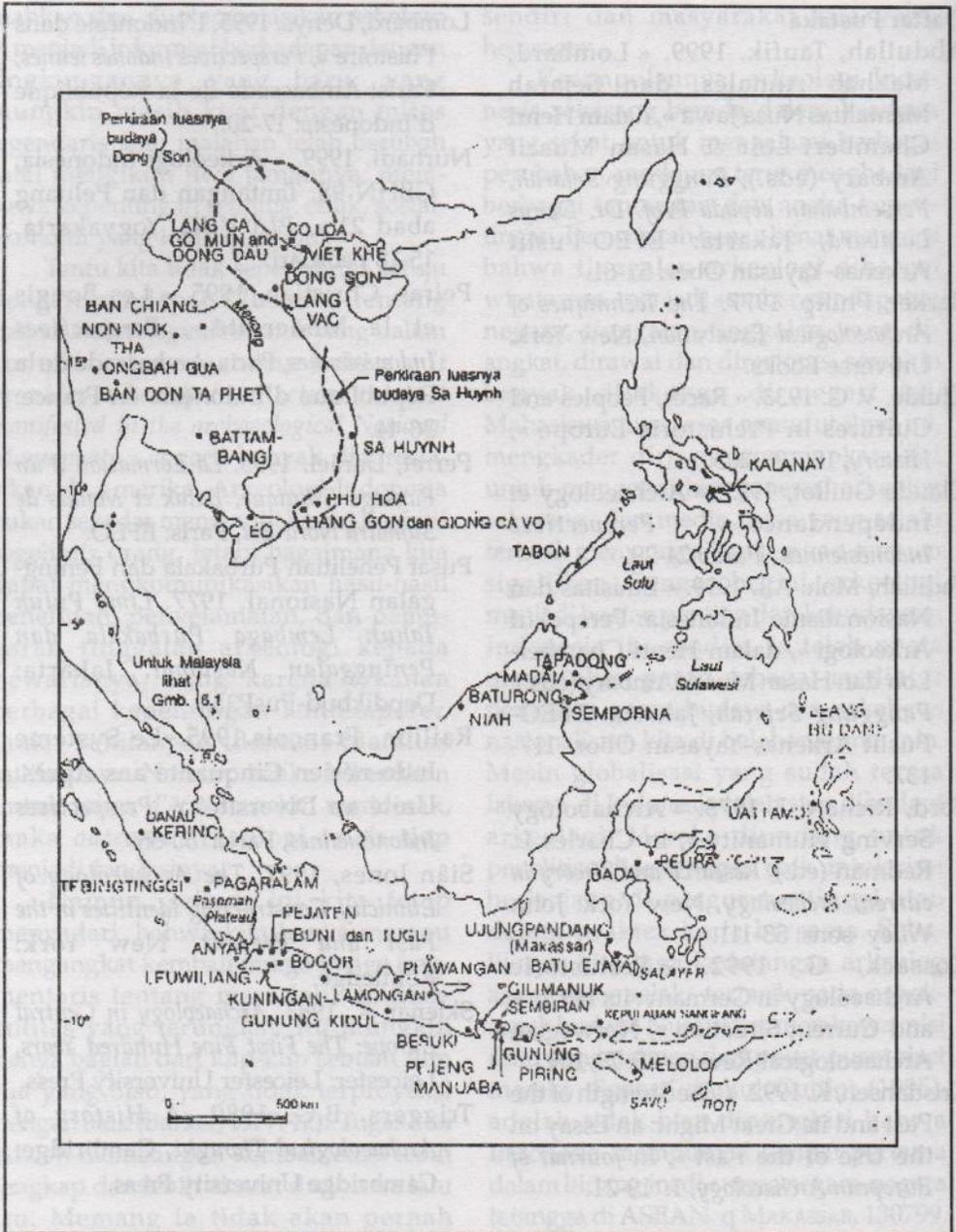
sendiri dan masyarakat kita yang heterogen.

Kesimpulannya, arkeologi Indonesia sekarang berada dalam keadaan yang sehat untuk mengalami berbagai perubahan, meskipun terus menghadapi berbagai tantangan dan aneka kepentingan. Pemerintah benar-benar mengerti bahwa tinggalan arkeologi dihargai wisatawan, menjadi sumber pendapatan negara, tinggalan-tinggalan yang diangkat, dirawat dan direstorasi semakin banyak dilakukan di negeri ini. Mahasiswa juga terus menuntut ilmu ini, mengkader diri, mempersiapkan diri untuk menggantikan generasi arkeolog sekarang, dan media masa yang selalu tertarik menyampaikan temuan-temuan signifikan. Dengan begini, arkeologi menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. Ia telah nyata memainkan peran sebagai mediator pembawa pesan budaya dan sekaligus nasionalisme kita di belahan dunia lain. Mesin globalisasi yang sudah terasa lajunya di Indonesia telah siap dihadapi arkeologi. Mereka diundang untuk penelitian di luar negeri baik untuk riset berjenjang di perguruan tinggi atau dalam praktek kerja bersama. Sebaliknya, kita juga kedatangan arkeolog asing yang selalu tertarik pada aspek-aspek budaya Nusantara; membawa misi ilmu pengetahuan dari pusat-pusat riset mereka. Seperti diakui Guillot (1995), adalah tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia mempunyai tempat pertama dalam bidang ini di antara negara-negara tetangga di ASEAN. q MAKASSAR, 130799.

#) Makalah dipresentasikan dalam *Diskusi Ilmiah Arkeologi XI*, IAAI, Makassar 14 Juli 1999 setelah mendapat koreksi dari penulis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1999. « Lombard, Mazhab Annales, dan Sejarah Mentalitas Nusa Jawa », dalam Henri Chambert-Loir & Hasan Muarif Ambary (eds.), *Panggung Sejarah, Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*, Jakarta: EFEO-Puslit Arkenas-Yayasan Obor: 51-61.
- Barker, Philip. 1977. *The Techniques of Archaeological Excavation*, New York: Universe Books.
- Childe, V. G. 1933. « Races, Peoples and Cultures in Prehistoric Europe », *History*, 18: 193-203.
- Claude Guillot, 1995. « Archaeology et Indépendance », *Perspectives Indonésiennes*, Paris: 24-29.
- Fadillah, Moh. Ali. 1999. « Etnisitas dan Nasionalisme Indonesia: Perspektif Arkeologi », dalam Henri Chamber-Loir dan Hasan Muarif Ambary (eds.), *Panggung Sejarah*, Jakarta: EFEO-Puslit Arkenas-Yayasan Obor: 117-137.
- Ford, Richard I. 1973. « Archaeology Serving Humanity », in Charles L. Redman (ed.), *Research and Theory in current archeology*, New York: John Wiley sons: 83-111.
- Kossack, G. 1992. « Prehistoric Archaeology in Germany: its History and Current Situation », *Norwegian Archaeological Review* 25: 73-109.
- Kristiansen, K. 1992. « The Strength of the Past and its Great Might: an Essay on the Use of the Past », in *Journal of European Archaeology*, 1: 19-21.
- Lombard, Denys. 1995. L'Indonésie dans l'histoire », *Perspectives Indonésiennes*, Paris: Ambassade de la République d'Indonésie: 17-20.
- Nurhadi. 1999. « Arkeologi Indonesia, GBHN 98, Tantangan dan Peluang abad 21 », *PIA VIII*, Yogyakarta, 15-18 Februari.
- Pelras, Christian. 1995. « Les Bougis et la Modernité », *Perspectives Indonésiennes*, Paris, Ambassade de la République d'Indonésie en France: 36-44.
- Perret, Daniel. 1995. *La Formation d'un Paysage Ethnique, Batak et Malais de Sumatra Nord-Est*, Paris: EFEO.
- Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. 1977. *Lima Puluh Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional*. Jakarta: Depdikbud-PusP3N.
- Raillon, François. 1995. « Le Système Indo-nésien Cinquante ans Après: Unité au Diversité? », *Perspectives Indonésiennes*, Paris: 50-55.
- Siân Jones, 1997. *The Archaeology of Ethnicity, Constructing Identities in the Past and Present*. New York: Routledge.
- Sklenar, K. 1983. *Archaeology in Central Europe: The First Five Hundred Years*, Leicester: Leicester University Press.
- Triggers, B.G. 1989. *A History of Archaeological Thought*, Cambridge: Cambridge University Press.



Peta persebaran situs-situs di Nusantara dari masa pertanian awal. Sumber Peter Bellwood, *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*, 2000, p.390.